

UPAYA PELESTARIAN TRADISI ADAT DAYAK MURUNG RAYA KALIMANTAN TENGAH DI TENGAH ARUS MODERNITAS

Akhmad Syahriansyah¹, Rizki Agung Novariyanto², Jasuli³
rianmura2020@gmail.com¹, rizkiagungnovariyanto@uibu.ac.id², jasuli@uibu.ac.id³
Universitas Insan Budi Utomo

ABSTRAK

Pelestarian tradisi adat di era modern merupakan arena kompleks, di mana masyarakat adat tidak hanya bertahan, tetapi juga secara aktif bernegosiasi dengan kencangnya arus globalisasi. Artikel ini mengkaji upaya pelestarian tradisi adat masyarakat Dayak Murung Raya di Kalimantan Tengah dengan menganalisis bentuk-bentuk pelestarian, strategi adaptasi yang dikembangkan, serta dinamika aktor dan relasi kuasa yang melingkupinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif desain studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatoris, dan studi dokumen dengan berbagai aktor kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian bersifat selektif: ritual komunal seperti Tiwah dan festival budaya mendapat panggung utama, sementara warisan material seperti anyaman rotan dan Rumah Betang mengalami degradasi. Strategi adaptasi mencakup penyesuaian hukum adat melalui musyawarah, pemanfaatan media sosial oleh generasi muda sebagai ruang promosi, hingga negosiasi antara praktik adat (misalnya, berladang) dengan regulasi negara dan logika pasar (misalnya, komersialisasi ritual). Dinamika ini digerakkan oleh konstelasi aktor, tokoh adat sebagai penjaga legitimasi, pemerintah sebagai fasilitator dominan, pemuda sebagai inovator, dan perempuan sebagai pilar pewarisan domestik yang kini juga memasuki ranah kepemimpinan formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelestarian budaya bukanlah upaya statis untuk menyelamatkan masa lalu, melainkan sebuah proses politik yang hidup, di mana identitas, makna, dan kedaulatan budaya terus-menerus dirundingkan. **Kata Kunci:** Pelestarian Budaya, Masyarakat Adat Dayak, Modernitas, Agensi Budaya, Relasi Kuasa.

PENDAHULUAN

Globalisasi dan modernitas membawa dampak paradoks bagi keberlangsungan masyarakat adat di berbagai belahan dunia. Di satu sisi, kemajuan teknologi digital dan meningkatnya interkoneksi pada skala global memicu terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat, khususnya generasi muda, yang semakin terekspos pada gaya hidup kosmopolitan. Fenomena ini lebih jauh mempercepat proses erosi budaya lokal. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut juga membuka ruang strategis bagi upaya revitalisasi budaya, advokasi hak-hak masyarakat adat, dan penguatan identitas kolektif pada ranah global (Wilson & Hendrikson, 2019; Appadurai, 1996; Ritzer, 2010). Ketegangan dialektis semacam ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, sebuah negara yang secara yuridis mengakui keberagaman budaya, tetapi dalam praktik masih kerap diwarnai oleh dinamika politik identitas serta keterbatasan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat (Heryanto, 2018). Dalam lanskap sosial-budaya yang demikian, perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan eksistensinya bukan hanya dimaknai sebagai bentuk perlawanan pasif, melainkan sebagai proses aktif dalam menegosiasikan ulang makna tradisi di tengah perubahan zaman.

Pulau Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang paling mencolok dalam dinamika tersebut. Selama beberapa dekade terakhir, Kalimantan mengalami eksploitasi sumber daya alam berskala besar, mencakup pembukaan hutan, perluasan perkebunan kelapa sawit, hingga pembangunan infrastruktur strategis. Proses ini tidak hanya menimbulkan kerusakan

ekologis yang masif, melainkan turut merekonfigurasi struktur sosial, ekonomi, dan spasial masyarakat adat Dayak yang telah mendiami wilayah ini secara turun-temurun. Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa proyek-proyek pembangunan seringkali menciptakan “wilayah perbatasan” (frontier) yang mempertemukan, bahkan mempertentangkan, sistem tata kelola sumber daya milik negara dan korporasi dengan sistem hukum adat dan kosmologi lokal (Eilenberg & Siscawati, 2020; Gaveau et al., 2014; WALHI, 2023). Akibatnya, masyarakat adat terdesak secara material dan spiritual, karena tanah, hutan, dan sungai yang menjadi basis kehidupan mereka kehilangan fungsi dan makna semula.

Salah satu komunitas yang menghadapi realitas tersebut secara langsung adalah masyarakat Dayak Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah. Komunitas ini memiliki kekayaan tradisi budaya yang kompleks, mulai dari ritual kematian Wara, sistem hukum adat (kerapetan adat) yang menjamin harmoni sosial dan ekologis, hingga warisan seni tutur dan kerajinan tradisional. Namun, eksistensi budaya tersebut kini menghadapi tantangan serius. Sejumlah studi lokal mengindikasikan adanya gejala pelemahan transmisi pengetahuan antar generasi. Generasi muda semakin teralienasi dari praktik-praktik ritual kebudayaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh sistem pendidikan formal yang berorientasi sentralistis serta daya tarik ekonomi di luar wilayah komunitas (Suhartono et al., 2021; UNESCO, 2003; Nakashima et al., 2012). Tanpa adanya intervensi pelestarian yang terencana dan berkelanjutan, maka kekayaan pengetahuan budaya yang tak ternilai ini terancam punah dalam kurun waktu satu hingga dua generasi ke depan.

Dalam perspektif akademik, fenomena pelestarian ini dapat dipahami sebagai bentuk agensi budaya sekaligus manifestasi dari ketahanan sosial. Alih-alih dilihat sebagai bentuk resistensi statis atau nostalgia terhadap masa lalu, berbagai inisiatif pelestarian dapat dipahami sebagai strategi aktif dalam meneguhkan identitas kolektif di tengah arus perubahan. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip Teori Identitas Sosial, di mana simbol-simbol budaya dimobilisasi sebagai sarana mempertahankan batas identitas kelompok dan memperkuat harga diri komunal (Tajfel & Turner, 1986). Bahkan lebih jauh, upaya pelestarian adat dapat ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan budaya terselubung terhadap model pembangunan dominan yang sering kali dianggap destruktif. Dalam banyak kasus, gerakan ini berjalan beriringan dengan advokasi lingkungan dan perjuangan sosial yang lebih luas, sehingga pelestarian budaya dan gerakan politik menjadi dua aspek yang saling terhubung dan tidak terpisahkan (Firdaus & Santosa, 2022).

Kendati berbagai penelitian terdahulu telah banyak menguraikan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat Dayak (misalnya Eilenberg & Siscawati, 2020; Suhartono et al., 2021), masih sedikit kajian yang mengkaji secara mendalam dan holistik memetakan bentuk, strategi, serta dinamika internal dari upaya pelestarian budaya adat yang dilakukan sendiri oleh komunitas, khususnya di Murung Raya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar berikut, yaitu (1) Apa saja bentuk konkret upaya pelestarian tradisi adat yang dijalankan masyarakat Dayak Murung Raya? (2) Bagaimana strategi adaptasi dan negosiasi yang masyarakat Dayak Murung Raya kembangkan guna menjaga relevansi budaya di tengah gempuran modernitas? (3) Siapa saja aktor-aktor kunci yang berperan, tokoh adat, pemuda, perempuan, pemerintah daerah dan bagaimana relasi kuasa mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan inisiatif pelestarian tersebut?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel ini bertujuan menyajikan analisis komprehensif mengenai pelestarian tradisi adat Dayak Murung Raya, bukan sebagai narasi runtuhnya suatu budaya, melainkan sebagai potret ketahanan, kreativitas, dan perjuangan masyarakat dalam mereformulasi identitas budaya di tengah dinamika zaman.

Temuan dari kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi substantif bagi penguatan studi budaya lokal dalam konteks global serta menyumbangkan gagasan untuk kebijakan pelestarian yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain studi kasus. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam makna, proses, serta konteks sosial yang melingkupi upaya pelestarian tradisi adat. Dimensi-dimensi tersebut tidak dapat direduksi menjadi angka atau diukur melalui instrumen kuantitatif semata, melainkan membutuhkan eksplorasi kontekstual yang bersifat emik dan interpretatif. Desain studi kasus dipilih karena memberikan kerangka yang tepat untuk menelaah satu fenomena secara intensif dalam ruang sosial dan kultural yang spesifik, yakni upaya pelestarian budaya yang berlangsung dalam masyarakat Dayak Murung Raya di Kalimantan Tengah. Penelitian lapangan dilakukan tiga bulan, dari April hingga Juni 2025, dengan lokasi penelitian tersebar di beberapa desa yang dipilih karena dinilai memiliki dinamika budaya yang representatif dan masih aktif menjalankan praktik-praktik adat.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan relevansi peran dan kedalaman pengetahuan masing-masing subjek terhadap isu yang diteliti. Strategi ini bertujuan untuk menangkap keragaman perspektif dari berbagai posisi sosial yang terlibat dalam praktik pelestarian budaya. Informan terdiri dari lima kelompok utama: (1) tokoh adat seperti Damang dan Mantir Adat yang berperan sebagai penjaga nilai-nilai tradisional; (2) generasi muda berusia 17–30 tahun guna mengetahui persepsi dan keterlibatan mereka dalam upaya revitalisasi; (3) perempuan, khususnya yang terlibat dalam kegiatan kerajinan, ritual domestik, dan transmisi pengetahuan lintas generasi; (4) seniman dan pegiat budaya yang aktif menghidupkan seni tradisi melalui pertunjukan maupun dokumentasi; serta (5) pejabat dari pemerintah daerah, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang memiliki wewenang kebijakan terkait pelestarian budaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara semi-terstruktur dipergunakan untuk menggali narasi, pengalaman, serta strategi yang dijalankan para aktor. Kedua, observasi partisipatoris yang memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung kehidupan sehari-hari masyarakat, pelaksanaan ritual, dan interaksi sosial dalam ruang adat. Ketiga, studi dokumen digunakan untuk menelaah regulasi lokal, arsip kelembagaan adat, serta liputan media yang relevan, sebagai bagian dari proses triangulasi data.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses ini meliputi tahap pembacaan intensif untuk memahami konteks, pengkodean terbuka untuk mengidentifikasi unit-unit makna, pengembangan tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian, serta interpretasi kritis untuk merumuskan argumen teoretis mengenai bentuk, strategi, serta relasi kuasa dalam pelestarian budaya lokal di Murung Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap data lapangan menyingkap bahwa upaya pelestarian tradisi adat masyarakat Dayak Murung Raya merupakan arena yang dinamis dan kompleks. Di satu sisi, tampak keberhasilan revitalisasi sejumlah elemen budaya pokok yang masih hidup dan dijaga; di sisi lain, terdapat kekhawatiran terhadap pudarnya tradisi tertentu yang tak lagi diminati atau dijalankan. Pelestarian budaya di sini tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh pertarungan antara kekuatan pelindung tradisi dan tekanan

modernitas yang kian menguat.

Vitalitas dan Ancaman terhadap Tradisi Adat

Beberapa tradisi adat yang menjadi pilar spiritual dan sosial masyarakat Dayak Murung Raya masih tetap hidup dan aktif dijalankan. Salah satu yang paling menonjol adalah ritual kematian Wara atau Tiwah, sebuah upacara sakral terakhir bagi umat Hindu Kaharingan untuk mengantarkan arwah leluhur ke alam baka. Prosesi ini mempertahankan elemen esensialnya seperti penyembelihan kerbau (totoh numbeng), yang menjadi substitusi simbolis dari tradisi Ngayau yang telah lama ditinggalkan. Upacara ini tidak hanya melestarikan keyakinan, tetapi juga menjadi ruang ekspresi kebersamaan sosial dan gotong royong.

Selain itu, tradisi agraris Nukan (menanam padi) tetap dipraktikkan oleh sebagian masyarakat, dan bahkan diangkat ke panggung publik dalam bentuk Festival Kankurung, sebuah pertunjukan budaya yang spektakuler dan telah memperoleh pengakuan nasional melalui rekor MURI. Tradisi lain seperti pernikahan adat Mandung dan Ticak Kacang juga masih dilestarikan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan adat belum sepenuhnya tergeser oleh budaya modern.

Namun, tidak semua warisan budaya mengalami nasib serupa. Beberapa di antaranya kini berada di ambang kepunahan. Keterampilan anyaman rotan, yang dahulu menjadi ciri khas ekonomi domestik perempuan adat, kini dapat dikatakan kritis akibat minimnya regenerasi dan rendahnya minat generasi muda. Tradisi Rumah Betang sebagai pusat kehidupan komunal juga mengalami degradasi; banyak bangunan di desa-desa seperti Konut dibiarkan rusak atau ditinggalkan, karena masyarakat memilih rumah modern yang dianggap lebih praktis dan sesuai dengan gaya hidup kekinian.

Peran Strategis Institusi Adat dan Negara

Dalam menghadapi realitas ganda antara revitalisasi dan erosi budaya, lembaga adat dan negara memainkan peran penting sebagai aktor penggerak pelestarian. Di tingkat komunitas, Lembaga Kedamaian berfungsi sebagai pusat dokumentasi, berupaya mencatat dan menyimpan tradisi lisan, hukum adat, serta nilai-nilai budaya agar tidak hilang ditelan waktu. Namun demikian, peran pemerintah daerah tampak lebih dominan dalam bentuk intervensi kelembagaan dan intervensi struktural.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya secara aktif memfasilitasi pelestarian budaya dengan mengalokasikan anggaran rutin untuk festival budaya tahunan Tira Tangka Balang. Tak hanya itu, pembangunan Lopo Betang sebagai bentuk modern dari Rumah Betang menjadi simbol pelestarian fisik budaya sekaligus instrumen pengembangan pariwisata. Menurut informan, seorang Damang (M), sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga adat menjadi fondasi utama dalam mendukung generasi muda untuk mengenal dan menjaga tradisi melalui pendekatan pendidikan formal dan informal.

Adaptasi Budaya dan Negosiasi Identitas

Pelestarian tradisi tidak semata-mata berfokus pada menjaga keaslian, melainkan juga pada kemampuan untuk beradaptasi secara selektif terhadap perubahan zaman. Komunitas adat Dayak Murung Raya menunjukkan kapasitas negosiasi budaya yang cukup kuat. Dewan Adat Dayak (DAD), misalnya, tetap menjaga kemurnian nilai-nilai adat, namun juga terbuka terhadap adaptasi melalui mekanisme musyawarah adat. Penyesuaian terhadap sistem Jipen (denda adat) merupakan contoh konkrit adaptasi yang dilakukan tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat.

Adaptasi juga tercermin dalam cara generasi muda merespons modernitas. (H), salah satu pemuda Dayak Siang, mewakili pendekatan konservatif—menjalani hidup dalam balutan tradisi dan terlibat penuh dalam kegiatan adat. Sementara itu, (JA), seorang ASN

sekaligus aktivis budaya, mewujudkan pendekatan progresif. Ia memanfaatkan media sosial, seni tari, dan desain kota untuk memperkenalkan kembali budaya Dayak ke ruang-ruang publik kontemporer. Meski berbeda jalur, keduanya menegaskan bahwa pelestarian tidak dapat dilepaskan dari nilai gotong royong dan falsafah huma betang sebagai kerangka hidup bersama.

Namun, proses adaptasi ini tidak lepas dari banyak tantangan. Kontestasi antara nilai sakral dan kepentingan ekonomi tampak dalam praktik Tiwah yang kerap disalahgunakan sebagai kedok untuk membuka arena perjudian. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai luhur adat dan logika pasar yang eksploitatif. Di ranah hukum negara, tradisi membakar ladang yang menjadi basis pertanian perempuan adat kini bertentangan dengan larangan pembakaran lahan. Sebagai kompromi, masyarakat diajarkan teknik pembakaran yang lebih terkendali sebagai bentuk negosiasi antara warisan leluhur dan regulasi lingkungan.

Pada sisi ekonomi, kerajinan perempuan seperti anyaman atau hasil ladang masih belum memiliki akses pasar yang memadai. Banyak dari mereka memproduksi hanya untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk komoditas ekonomi, karena ketiadaan saluran distribusi dan pasar budaya yang mendukung. Potret ini menegaskan bahwa pelestarian budaya tidak cukup hanya berbasis semangat dan nilai, tetapi juga menuntut dukungan struktural dan kebijakan afirmatif.

Konstelasi Aktor dan Relasi Kuasa dalam Pelestarian Budaya

Dinamika pelestarian budaya di Murung Raya dibentuk oleh interaksi berbagai aktor dengan sumber kuasa yang beragam. Tokoh adat, seperti Damang dan jajaran mantir, memegang kuasa simbolik dan normatif dalam menjaga otoritas atas makna dan pelaksanaan adat. Pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator dan penggerak kebijakan, namun di saat yang sama memiliki kecenderungan mengarahkan pelestarian budaya ke ranah pariwisata yang terkadang mengurangi nilai intrinsiknya.

Generasi muda tampil sebagai agen kultural yang lentur dan inovatif. Dalam konteks relasi kuasa transgenerasional, masyarakat adat seperti (H) mendapat tempat dalam struktur adat karena latar belakang keluarga. Namun ada pula kekuasaan simbolik baru yang muncul dari kapasitas profesional dan kreativitas seni, sebagaimana ditunjukkan oleh (JA) yang karya seninya bahkan terwujud dalam motif bangunan dan ruang publik kota.

Sementara itu, perempuan adat memainkan dua peran kunci sekaligus. Di satu sisi, para perempuan adat ini menjadi penjaga budaya dalam ruang lingkup keluarga melalui transmisi bahasa, nilai, dan kebiasaan kepada anak-anak. Di sisi lain, mereka juga menjadi pelaku utama dalam ritual, serta mulai mendapat pengakuan dalam struktur adat formal. Data bahwa 30% dari 232 mantir di Murung Raya adalah perempuan menunjukkan pergeseran ke arah representasi yang lebih setara. Meski demikian, tantangan eksternal seperti pengaruh negatif media digital terhadap anak-anak menunjukkan bahwa penguatan peran perempuan dalam pelestarian budaya masih memerlukan dukungan tersistem.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelestarian tradisi adat masyarakat Dayak Murung Raya mencerminkan dinamika yang kompleks, di mana komunitas adat tidak sekadar menjadi korban dari arus modernitas dan globalisasi, melainkan juga tampil sebagai aktor aktif yang menegosiasikan identitas budaya mereka. Dalam konteks ini, pelestarian budaya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya mempertahankan masa lalu, tetapi justru sebagai bentuk agensi budaya (cultural agency) yang secara sadar dan strategis dijalankan oleh komunitas dalam menjawab tantangan zaman. Perspektif ini selaras dengan pandangan Tajfel dan Turner (1986) dalam Social Identity Theory, bahwa simbol-simbol

budaya, seperti ritual dan arsitektur adat, memainkan peran penting dalam memperkuat rasa kebersamaan dan harga diri kolektif.

Ritual kematian Wara atau Tiwah, misalnya, merupakan contoh konkret bagaimana tradisi tetap hidup meskipun mengalami transformasi dalam bentuk dan konteksnya. Prosesi ini tidak hanya menjadi ruang spiritual untuk mengantarkan arwah leluhur, tetapi juga menjadi panggung sosial untuk menegaskan eksistensi budaya Dayak di hadapan dunia luar. Elemen totoh numbeng (penyembelihan kerbau) sebagai simbol pengganti tradisi Ngayau menjadi bukti bahwa komunitas mampu mengadaptasi nilai-nilai lama ke dalam praktik baru yang lebih relevan secara etis dan hukum. Sementara itu, Festival Kankurung, yang mengangkat tradisi Nukan (menanam padi), menjadi bukti keberhasilan pelestarian melalui transformasi budaya menjadi komoditas pariwisata yang tetap mengandung makna identitas lokal. Temuan ini memperkuat argumen Wilson dan Hendrikson (2019) bahwa masyarakat adat memiliki kapasitas untuk memanfaatkan teknologi dan panggung global sebagai ruang advokasi dan revitalisasi budaya.

Namun, vitalitas budaya tersebut tidak menutupi kenyataan bahwa sejumlah aspek tradisi mengalami kemunduran. Keterampilan anyaman rotan, misalnya, menghadapi ancaman kepunahan karena minimnya regenerasi dan lemahnya dukungan ekonomi. Hal serupa terjadi pada Rumah Betang yang secara fungsional telah ditinggalkan, meskipun pemerintah membangun Lopo Betang sebagai simbol revitalisasi fisik budaya. Kontradiksi ini mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai spiritual-komunal yang dihayati masyarakat dengan pendekatan simbolik-infrastruktur yang diambil negara. Dalam hal ini, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator yang menonjolkan dimensi kultural dalam kerangka pariwisata dan pembangunan daerah. Pembangunan Lopo Betang dan penyelenggaraan festival tahunan Tira Tangka Balang memperlihatkan bahwa negara hadir dalam pelestarian budaya, namun dengan logika yang tidak selalu sejalan dengan logika komunitas adat.

Sementara lembaga adat seperti Dewan Adat Dayak (DAD) dan Lembaga Kedamaian memainkan peran penting dalam mendokumentasikan dan menafsirkan ulang hukum serta ritus adat, mereka juga menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan. Penyesuaian nilai Jipen (denda adat) melalui musyawarah komunitas adalah salah satu bentuk bagaimana adat beroperasi sebagai sistem hukum yang lentur. Temuan ini selaras dengan konsep cultural resilience (Berkes & Ross, 2013), yang menyatakan bahwa ketahanan budaya tidak terletak pada keteguhan terhadap bentuk lama, melainkan pada kemampuan untuk merespon perubahan secara kontekstual.

Generasi muda tampil sebagai aktor pelestari yang memperlihatkan keberagaman strategi. Sebagian, seperti (H), mewarisi nilai-nilai secara langsung dari keluarga dan tetap menjaga praktik adat secara utuh. Sebagian lain, seperti (JV), menampilkan model pelestarian yang lebih adaptif dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial sebagai ruang ekspresi budaya. Ia bahkan berhasil membawa elemen estetika tradisional ke ruang publik kota melalui desain arsitektur dan pertunjukan seni. Fenomena ini dapat dipahami dalam kerangka cultural production Bourdieu (1993), di mana generasi muda menghasilkan modal simbolik baru untuk memperkuat posisi budaya mereka dalam masyarakat modern.

Namun demikian, tidak semua proses adaptasi berjalan tanpa gesekan. Kontestasi nilai muncul dalam kasus ritual Tiwah yang oleh sebagian tokoh adat dan pemuka agama Hindu Kaharingan dianggap telah dikomodifikasi oleh kepentingan ekonomi melalui praktik perjudian. Ini menunjukkan adanya konflik antara nilai sakral dan kepentingan pragmatis, yang dapat melemahkan makna asli ritus adat. Sementara itu, di ranah ekologis, praktik tradisional berladang dengan cara membakar lahan kini berhadapan dengan kebijakan

negara yang melarang pembakaran. Perempuan adat mencoba menjembatani ketegangan ini dengan menyosialisasikan teknik pembakaran terkendali kepada generasi muda, yang mencerminkan negosiasi antara pengetahuan lokal dan regulasi modern.

Keterlibatan perempuan dalam pelestarian adat juga menunjukkan perkembangan signifikan. Selain berperan dalam transmisi nilai dan keterampilan, perempuan kini memiliki posisi formal sebagai mantir adat, bahkan mencakup 30% dari total struktur kelembagaan adat di Murung Raya. Meskipun demikian, pengaruh negatif media sosial terhadap anak-anak menjadi tantangan serius, sekaligus memperlihatkan bahwa pelestarian budaya juga harus memperhatikan ekologi digital dan pendidikan keluarga. Di sisi lain, fakta bahwa banyak perempuan hanya memproduksi kerajinan untuk kebutuhan sendiri tanpa akses pasar juga menunjukkan bahwa pelestarian budaya harus dibarengi dengan pendekatan ekonomi berkeadilan.

Pelestarian budaya di Murung Raya merupakan hasil interaksi berlapis antara komunitas adat, negara, generasi muda, dan perempuan, masing-masing dengan sumber daya, posisi, dan strategi yang berbeda. Konstelasi ini tidak selalu harmonis, namun menjadi bukti bahwa budaya adalah medan yang terus dinegosiasikan, ditafsirkan ulang, dan dibentuk dalam relasi kuasa yang dinamis. Sejalan dengan Firdaus dan Santosa (2022), pelestarian budaya di sini tidak dapat dilepaskan dari perjuangan atas ruang, sumber daya, dan pengakuan identitas. Maka dari itu, pelestarian adat tidak cukup dilihat sebagai upaya simbolik semata, melainkan sebagai bentuk perlawanan kultural yang strategis dalam menjaga martabat komunitas adat di tengah tekanan zaman.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian tradisi adat Dayak Murung Raya bukanlah sebuah proses tunggal, melainkan sebuah arena yang kompleks dan penuh kontradiksi. Temuan utama menegaskan bahwa komunitas adat Dayak Murung Raya bukanlah entitas pasif yang tergerus oleh modernitas, melainkan subjek aktif yang memiliki agensi untuk beradaptasi, bernegosiasi, dan bahkan melakukan perlawanan budaya secara strategis. Pelestarian yang terjadi bersifat selektif, di mana tradisi yang memperkuat identitas komunal secara performatif seperti ritual Tiwah dan festival budaya cenderung direvitalisasi, sementara praktik budaya domestik seperti kerajinan tangan menghadapi ancaman serius.

Strategi yang dikembangkan mencakup adaptasi internal melalui musyawarah adat, inovasi yang dipelopori generasi muda melalui pemanfaatan teknologi digital, serta negosiasi yang alot dengan kekuatan eksternal seperti regulasi negara dan logika pasar. Interaksi antara berbagai aktor, tokoh adat, pemerintah daerah, generasi muda, dan perempuan adat, menyingkap adanya dinamika relasi kuasa yang tidak simetris namun produktif. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dominan, sementara kaum muda dan perempuan mulai mengukir ruang pengaruh baru melalui kreativitas dan representasi formal.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pelestarian budaya harus bergerak melampaui pendekatan seremonial dan festivalisasi semata. Perlu adanya dukungan nyata terhadap ekosistem budaya secara menyeluruh, termasuk penguatan ekonomi kerajinan lokal dan perlindungan terhadap praktik pengetahuan adat seperti berladang. Selain itu, kebijakan harus mengakui dan memfasilitasi peran beragam aktor, terutama kaum muda dan perempuan, sebagai motor penggerak revitalisasi budaya. Untuk penelitian selanjutnya, studi komparatif dengan sub-etnis Dayak lainnya atau studi longitudinal untuk melihat perkembangan strategi adaptasi dalam jangka panjang dapat

memperkaya pemahaman tentang ketahanan budaya masyarakat adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: Toward an integrated approach. *Society & Natural Resources*, 26(1), 5–20.
- Bourdieu, P. (1993). *The field of cultural production: Essays on art and literature*. Columbia University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Eilenberg, M., & Siscawati, M. (2020). Resource governance and indigenous livelihoods on the Bornean frontier. *World Development*, 135, 105072.
- Firdaus, A. Y., & Santosa, A. B. (2022). Cultural resistance and environmental justice movements: A case study of customary forest advocacy in Central Kalimantan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 24(2), 145–160.
- Gaveau, D. L. A., Sloan, S., Molidena, E., Yaen, H., Sheil, D., Abram, N. K., Ancrenaz, M., Nasi, R., Quinones, M., Wielaard, & Meijaard, E. (2014). The Borean Forest. *Current Biology*, 24(18).
- Heryanto, A. (2018). *Identity and pleasure: The politics of Indonesian screen culture*. NUS Press.
- McCarthy, J. F., & Obidzinski, K. (2017). The oil palm complex in Southeast Asia: A long-run perspective on its environmental and social impacts. *Journal of Peasant Studies*, 44(2).
- Nakashima, D. J., K. Galloway McLean, H. D. Thulstrup, A. Ramos Castillo, and J. T. Rubis. (2012). *Weathering Uncertainty: Traditional Knowledge for Climate Change Assessment and Adaptation*. Paris: UNESCO.
- Picard, M. (2015). *Tourism, Culture and Development in Bali: The Social Construction of an Edifice*. Routledge.
- Postill, J. (2018). *The Rise of Nerd Politics: Digital Activism and Political Change*. Pluto Press.
- Ritzer, G. (2010). *Globalization: A Basic Text*. Wiley-Blackwell.
- Robinson, K. (2017). *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*. Routledge.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.
- Suhartono, E., Wulandari, D., & Syamsudin, M. (2021). Erosi pengetahuan ritual: Tantangan pewarisan tradisi Wara pada generasi muda Dayak Murung. *Antropologi Indonesia*, 42(1), 33–49.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of intergroup relations* (pp. 7–24). Nelson-Hall.
- UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris: UNESCO.
- WALHI. (2023). *Deforestation Report Indonesia 2023*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Wilson, A., & Hendrikson, K. (2019). *Indigenous peoples in the digital age: A new paradox of preservation and transformation*. Stanford University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.